

TENTARA DALAM NEGARA Tujuh Tantangan Menghadang ABRI

Oleh : Naryadi

..... Tulisan ini merupakan himpunan pengalaman mewakili Lembaga Ketahanan Nasional dalam berbagai forum pertemuan yang marak saat ini, disampaikan dalam bentuk esai yang lugas, agar ditangkap tanpa bias

ABRI MENJADI ALAT PENGUASA

Mengapa ABRI tidak memihak Rakyat ? ABRI lahir dari rakyat dan berjuang bersama rakyat, ABRI adalah Tentara Rakyat. Mengapa ABRI memihak Penguasa, bukan memihak Rakyat. Pemerintah Orde Baru yang dipimpin ABRI, ternyata membuat rakyat melarat dan sengsara, bukannya mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur. Pembangunan Nasional yang berkesinambungan selama tiga dekade, hanya menghasilkan segelintir manusia, yang sebagian non pribumi dan sebagian lagi keluarga besar Soeharto, menjadi konglomerat, serta warisan hutang yang demikian besar.

ABRI mendukung dan mempertahankan pemerintah Orde Baru yang sarat dengan KKN korupsi kolusi nepotisme dan banyak Jenderal kaya hasil kolusi dengan non pribumi dan keluarga besar Soeharto. Karena itu rakyat tidak senang terhadap ABRI, bahkan cenderung antipati. Kalau dulu rakyat diinjak **sepatu lars** ABRI, maka kini ABRI diinjak **sandal jepit** rakyat.

terungkap dalam berbagai forum pertemuan yang sedang marak saat ini. Cara dan gaya penyampaian pertanyaan dan tanggapan yang diajukan diwarnai muatan emosi sarat dengan nuansa rasa benci terhadap ABRI. Para pejabat ABRI termasuk yang sudah purnawirawan bisa mendadak sakit gigi, menghadapi berbagai pertanyaan dan tanggapan yang bermuatan gugatan dan hujatan terhadap sikap dan tatailaku ABRI sampai saat ini.

Pernyataan di atas adalah salah satu himpunan dari berbagai pertanyaan dan tanggapan yang

ABRI saat ini memang sedang terpojok, dan dipojokkan oleh

berbagai kelompok terutama yang selama pemerintah Orde Baru berada diluar sistem, atau sebagai oposisi ilegal karena pemerintah Orde Baru tidak menghendaki adanya oposisi legal. ABRI yang diharapkan dapat menjembatani antara kelompok yang berada di dalam sistem Orde Baru dengan yang berada di luar, ternyata tidak dapat memenuhi harapan tersebut. Bahkan kenyataan menunjukkan, bahwa ABRI ikut menekan, menganiaya dan membantai mereka yang berada di luar sistem dan menentang Orde Baru. ABRI yang menempatkan diri paling bertanggung jawab menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, menemui kenyataan bahwa sistem politik telah membuat ***bangsa ini terkotak-kotak***.

ABRI memang sedang terpojok dan dipojokkan dalam permainan suprastruktur. Di sisi lain permainan ABRI terasa tidak enak ditonton oleh lingkungan infrastruktur. Kini ABRI sedang tidak populer, tidak banyak yang masih mau membela ABRI. Mereka yang membela ABRI, dengan mengangkat hal-hal yang positif dari ABRI, tidak akan populer dalam forum pertemuan seperti ini.

ABRI dalam posisi yang ***dilematis***. Kalau ABRI memihak Pemerintah, dikatakan sebagai alat penguasa yang menekan rakyat. Sebaliknya kalau ABRI memihak rakyat, dikatakan menentang pemerintah yang sah dan

menimbulkan anarki, bahkan memungkinkan terjadinya kudeta militer terhadap pemerintah. Menghadapi masalah dilematis tersebut, terlihat bahwa ABRI adakalanya menjadi ragu dan lamban dalam pengambilan keputusan pada strata atas. Hal tersebut berakibat bahwa pada strata bawah menjadi kekurangan waktu untuk penyiapan operasional lapangan. Hasilnya adalah berbagai deviasi operasional, atau sering disebut sebagai penyimpangan prosedur.

Sesuai teori yang dikembangkan di Lemhannas, bahwa masalah yang berada pada ***strata dilematis***, tidak bisa didekati dengan pemikiran dan penalaran pada strata kritis ataupun ideal. Masalah dilematis haruslah diselesaikan dengan pemikiran dan penalaran ***logik***. Pemikiran dan penalaran logika menuntut kemampuan komunikasi dan kemampuan berpikir: ***communication and thinking skill (CAT)***, yang dilandasi dengan pikiran jernih (***clear thinking***).

Keadaan yang membuat ABRI dalam posisi dilematis bahkan terpojok dan kemudian terpuruk tidaklah sepenuhnya kesalahan ABRI. Kalau memihak pemerintah salah, dan kalau memihak rakyat juga salah, maka masalahnya adalah mengapa terjadi bahwa ***antara pemerintah dengan rakyat tidak sejalan***. Mengapa pembangunan nasional yang sesuai arahan GBHN seharusnya diabdikan bagi

kepentingan rakyat banyak, ternyata lebih menghasilkan kemakmuran bagi segelintir manusia Indonesia, dan belum dapat dinikmati oleh sebagian besar rakyat Indonesia. Dalam keadaan demikian segenap kekuatan ABRI harus mendukung dan mengamankan kelancaran penyelenggaraan pembangunan nasional tersebut. Bahkan ABRI harus menerima keadaan dimana anggaran belanja yang disediakan pemerintah tidak cukup bagi kesejahteraan para Prajurit ABRI.

Sungguh suatu ironi, bahwa pemerintah Orde Baru yang didukung Golkar dan ABRI, bahkan Golkar menang mutlak dan menjadi mayoritas tunggal, ternyata belum mampu memenuhi *aspirasi rakyat*. Pembangunan Nasional yang berkesinambungan sebagai perwujudan falsafah Pancasila, ternyata berakhir dengan hilangnya *wahyu* legitimasi dari hati rakyat.

Pembangunan Nasional yang mengutamakan ekonomi, mendorong kecenderungan kemakmuran materi menjadi tolok ukur keberhasilan hidup, dan semakin marak *money politics* di kalangan aparat pemerintah dan jajaran ABRI. Karena anggaran ABRI kecil, maka para Pemimpin, para Perwira ABRI, mencari tambahan biaya untuk memenuhi kesejahteraan para Prajurit dan kesejahteraan dirinya.

Salah satu referensi dari mata ajaran Kepemimpinan di Lemhannas adalah buku *The Ruler's Imperative*

dari W. Howard Wriggins. Salah satu ciri dari kepemimpinan negara berkembang menurut *Wriggins* adalah bahwa para Pembantu Pimpinan *kurang cepat menangkap* keinginan Pemimpin, dan keinginan Pemimpin sukar dicerna oleh para pembantunya. Meskipun buku *Wriggins* tersebut ditulis pada tahun 1969 namun sampai sekarang masih relevan, terutama bagi Kepemimpinan di Indonesia. Tidak mudah menangkap dan mencerna pemikiran dan keinginan Pemimpin Indonesia. Dalam Negara Berkembang yang masih menerapkan ciri, gaya dan budaya Kepemimpinan Panutan, para Pembantu Pemimpin dan calon Pembantu Pemimpin tidak terlalu dituntut untuk mencerna pemikiran dan kebijaksanaan Pemimpin, tetapi lebih mudah memilih untuk ikuti saja apa maunya Pemimpin. ABRI yang berada di dalam sistem politik, terperangkap di dalam budaya Kepemimpinan Panutan tersebut.

ABRI DITINGGALKAN RAKYAT

Mengapa ABRI ditinggalkan rakyat? Semula rakyat takut terhadap ABRI, tetapi sekarang rakyat tidak takut lagi menghadapi ABRI. Slogan kemenangan ABRI-Rakyat, adalah slogan kosong belaka. Ternyata ABRI lebih memihak Penguasa yang KKN, dan meninggalkan aspirasi rakyat banyak, maka kini ABRI terpisah dari rakyat. ABRI yang berpredikat Tentara Rakyat ternyata masih

melekat kuat ciri militernya yang hierarki otoriter, sehingga cenderung sebagai penghambat proses demokrasi. Berbagai bukti kekejaman ABRI sekarang terungkap, dan rakyat tertegun mengetahui berbagai kebrutalan ABRI dalam menjalankan operasi militernya. Bahwa ABRI memihak Penguasa sudah diketahui rakyat, tetapi bahwa ABRI sampai pada disiplin mati sehingga menuruti segala kehendak Presiden selaku Panglima Tertinggi, sungguh membuat rakyat menjadi terheran-heran. ABRI bukan Tentara Rakyat lagi, bukan TNI seperti dulu yang lahir dari rakyat. Rakyat sudah jarang mendengar sebutan Tentara dan Militer seperti jaman perjuangan kemerdekaan dahulu. ABRI supaya dibubarkan dan diganti dengan Tentara atau Militer.

Rangkuman pertanyaan dan tanggapan tersebut di atas, selalu marak dalam setiap forum berbagai pertemuan saat ini. Dengan acuan para Panelis yang memang dikenal sebagai tokoh-tokoh anti ABRI, maka forum pertemuan diwarnai hujatan yang sarat muatan yang memojokkan ABRI. Suasana forum pertemuan tidak seimbang, dalam arti yang memihak atau masih memunculkan hal-hal positif dari ABRI sangat sedikit. Panelis dari pihak ABRI termasuk yang sudah purnawirawan selalu minoritas. Bahkan para Perwira ABRI yang masih aktif dan yang purnawirawan yang hadir sebagai peserta bukan pembicara dalam forum pertemuan tersebut

lebih banyak memilih berdiam diri, tidak proaktif.

Kalau kita kembali menyimak teori kepemimpinan, maka di samping asas-asas dan prinsip-prinsip kepemimpinan, kita juga mengenal ciri dan gaya kepemimpinan. Ciri dan gaya kepemimpinan, di samping dipengaruhi oleh watak dan kepribadian pemimpin, juga sangat dipengaruhi oleh dan tergantung pada *masyarakat yang dipimpin*. Kalau budaya masyarakat yang dipimpin masih paternalistik, bahkan feodalistik, maka kepemimpinan yang demokratik justru mengandung risiko tinggi. Kita ingat cerita Piter II, Raja Brasil di abad 19, yang harus membayar mahal dan digantung karena mengembangkan demokrasi dengan proses yang kurang tepat. Bagaimana dengan masyarakat bangsa Indonesia? Sebagai negara yang baru merdeka setelah Perang Dunia, baru saja lepas dari alam kolonialisme dan feodalisme selama berabad, yang sarat kemajemukan dan tersebar dari Sabang sampai Merauke, kiranya masih berada dalam proses untuk memahami jadinya.

Dengan latar belakang sejarah sebagai negara kerajaan Sriwijaya, Majapahit, Mataram dan yang lain, kemudian dijajah negara-negara kerajaan juga, tentulah tidak mudah membawa rakyat masyarakat bangsa Indonesia yang besar jumlahnya tersebar dan sarat kemajemukan ke dalam negara republik yang

demokratis, di mana kekuasaan sepenuhnya di tangan rakyat. Kiranya perlu suatu proses yang relatif panjang untuk mengubah masyarakat yang paternal feodalistik menjadi masyarakat yang demokratis. Sejarah mencatat di tahun 1955-1959, Dewan Konstituante yang dipilih rakyat secara demokratis, ternyata tidak mampu mencapai komitmen nasional, untuk mewujudkan kesepakatan bersama, untuk musyawarah mencapai mufakat. Kepentingan golongan masih kuat menonjol, belum siap untuk diabdikan bagi kepentingan nasional. Kemudian rakyat menerima pilihan suatu *demokrasi terpimpin*, karena situasi lingkungan strategik nasional telah berada dalam keadaan kritis. Berbagai gejolak sosial (poleksosbudmil) merebak di segenap penjuru tanah air, dan nyaris memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa.

Keadaan masyarakat bangsa Indonesia tersebut tidaklah sendirian, tetapi dialami pula oleh berbagai negara yang baru merdeka setelah Perang Dunia, yang sedang mengalami proses dekolonisasi, sedang mencari dan memahami jatidiriya. Dalam keadaan demikian, Angkatan Bersenjata Tentara atau Militer akan tumbuh berkembang dalam proses yang lebih cepat dibanding kelompok profesi lain. Tentara langsung menghadapi tantangan untuk mempertahankan kemerdekaan dan kedaulatan yang baru direbut. Rakyat yang militan

para pemuda pejuang akan mengisi organisasi Tentara, yang kemudian disebut Tentara Rakyat. Dengan dukungan segenap kekuatan rakyat *national war power* maka Tentara dapat merebut dan mempertahankan kemerdekaan dan menegakkan kedaulatan.

Tidak hanya mampu mengusir musuh dari luar, akan tetapi Tentara Rakyat juga mampu mengatasi berbagai gejolak sosial yang muncul akibat dari benturan dan konflik kepentingan antar berbagai golongan dan kekuatan di dalam negeri. Bangsa Indonesia yang sarat dengan kemajemukan, kemudian menyebut berbagai konflik sosial tersebut dengan masalah SARA suku agama ras antar golongan.

Mengapa profesi kelompok Tentara lebih cepat maju di dalam negara berkembang negara hasil dekolonisasi ? Ada tiga sebab yang dapat diangkat disini :

Pertama, berjuang membela negara merupakan idola pemuda pada jaman perang kemerdekaan. Para Pemuda yang berani dan bersedia mengorbankan jiwa raga adalah pahlawan bangsa. Maka para Pemuda Pilihan memilih bergabung dalam Tentara. Tentara mendapat masukan putera-putera bangsa terbaik.

Kedua, sejak dini Tentara melakukan pendidikan, karena tanpa pendidikan dan latihan anggota prajurit Tentara akan mati sia-sia, dan

lebih dari itu diperlukan segera tenaga pengganti. Kita tahu bahwa profesi Tentara mengandung risiko mati yang tinggi. Untuk perang diperlukan ketrampilan olahyuda. Bagi Prajurit yang berpangkat Perwira, olahyuda tidak hanya menuntut kemampuan olahotot saja, akan tetapi lebih dari itu memerlukan kemampuan olahpikir. Karena itu bagi para Perwira diselenggarakan suatu sistem pendidikan yang bertahap, bertingkat dan berlanjut, namun tetap berlandaskan Dwi Warna Purwa Cendekia Wusana, lebih mengutamakan pengabdian kepada negara daripada pengabdian kepada ilmu. Pendidikan secara bertahap, bertingkat dan berlanjut tersebut, secara total memerlukan seperempat waktu dari karier seorang Perwira. Karena itu kiranya dapat dimengerti bila kemudian para Perwira menjadi kelompok elit yang terorganisir, dengan kemampuan intelektual yang tinggi, dan menguasai informasi mutakhir, dan menempati dan mengemban peran yang strategik di dalam masyarakat bangsa yang sedang berkembang.

Ketiga, organisasi Tentara Militer berbentuk Tetrahidron, bentuk piramidal. Suatu bentuk sederhana, dengan hierarki dan garis komando yang jelas. Memiliki *inner-logic* dengan kesatuan politik tertutup yang memungkinkan suatu gagasan atau idea cepat menjadi keputusan dan cepat pula dioperasionalkan, dengan kemungkinan deviasi operasional yang minimum. Dengan organisasi

demikian maka Tentara mampu berada di garis depan untuk mengatasi berbagai gejolak sosial.

Kesederhanaan itulah yang memungkinkan organisasi militer menjadi organisasi yang kokoh. Organisasi yang dengan cepat dapat mengetahui titik-titik kelemahannya sendiri, dan dengan cepat dan sederhana pula mengatasinya. Mencopot dan mengganti, memasang dan memindahkan, mengangkat dan menggeser meskipun melalui sistem dan prosedur tertentu namun semua itu relatif sangat sederhana dibanding organisasi masyarakat bangsa yang lain yang justru cenderung semakin membesar.

Organisasi tetrahidron mengandung gagasan struktural, yang memiliki (1) keutuhan menyeluruh (*wholeness*), (2) kemampuan mengatur diri (*self-regulation*), dan (3) kemampuan menyesuaikan diri (*self transformation*). Semua makhluk hidup memiliki kemampuan seperti itu, dan untuk itu makhluk hidup dilengkapi susunan organisasi yang ketat dan sistemik. Kalau ada embanan baru atau terjadi penyimpangan, maka secara evolusioner biologik akan melahirkan semacam organisme baru (mutant), dan untuk itu akan membentuk alternatif atau variant, untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya.

Lalu mengapa ABRI yang mewarisi nilai-nilai TNI, Tentara

Rakyat, kemudian justru ditinggalkan oleh rakyat? Kalau embanan dan penyimpangan terhadap tetrahidron semakin besar, dan pembentukan organisme baru semakin banyak, maka tetrahidron akan semakin gemuk dan tidak sederhana lagi. Memang ada dampak positif yaitu mampu meredam berbagai gejolak sosial dan menjaga stabilitas nasional, tetapi ada pula *dampak negatifnya*, baik ke luar maupun ke dalam. Ke luar akan mendesak lahan kelompok masyarakat yang lain dan cenderung menjadi totaliter. Sedangkan ke dalam, tetrahidron menjadi gemuk dan lamban. Berbagai embanan simbiosis menimbulkan berbagai *mutant* dan *variant*, sehingga tidak sederhana dan tidak tertutup lagi. Hal tersebut berpengaruh terhadap garis komando, di mana suatu gagasan tidak cepat menjadi keputusan dan lamban dalam operasional, dengan disertai berbagai deviasi operasional, yang sering disebut dengan penyimpangan prosedur.

Simbiosis yang dilakukan oleh TNI pada era Perang Kemerdekaan, melahirkan nilai-nilai perjuangan TNI, dan menempatkan TNI di dalam sistem politik negara, pemikiran dan penalaran para Perwira TNI ikut menentukan politik negara. Untuk mewujudkan kelangsungan hidup bangsa dan negara tersebut, TNI membayar mahal, jiwa raga harta dan benda. Tergores dalam hati setiap Prajurit TNI, pesan Pak Dirman: *teruskan perjuangan; korban telah*

banyak.

Demikian pula pada periode akhir pemerintah Orde Lama, TNI ABRI melakukan berbagai simbiosis untuk meredam kekuatan PKI yang melebar memasuki berbagai kekuatan sosial dalam tatanan masyarakat bangsa Indonesia. Kalaupun TNI membayar mahal pula untuk mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. TNI AD kehilangan putera-putera terbaiknya. Simbiosis TNI ABRI dengan berbagai kelompok masyarakat tersebut menghasilkan kekuatan sosial-politik baru, Golongan Karya **Golkar** yang kemudian mendominasi pemerintah negara, serta menempatkan seorang Prajurit TNI ABRI sebagai Presiden.

Pada era Orde Baru, paling tidak sampai dengan awal tahun 80-an, ABRI masih memenuhi harapan rakyat untuk mewujudkan AMPERA. Namun setelah medio 80-an harapan tersebut mulai pudar. ABRI semakin terperangkap dalam sistem politik penguasa, sistem pemerintah yang semakin kurang dapat menangkap aspirasi rakyat. Simbiosis politik dan ekonomi demikian rumit dengan berbagai mutant, alternatif dan variant yang dibentuknya, membuat sensor tetrahidron lamban dan tidak sensitif. Urat syaraf kehidupan, yaitu rumusan perangkat lunak doktrin dan undang-undang, yang diterbitkan kemudian, menempatkan ABRI

dalam belenggu kekuasaan yang sukar dilepaskan.

Rumusan doktrin dan UU kurang mengatur sistem tentara secara logik dan sistemik pada tatanan komando kendali dan komponen-komponen kekuatan, sehingga tidak mudah untuk penjabarannya. Selain itu komando kendali dari Presiden sebagai jabaran dari UUD 1945 sebagai pemegang kekuasaan tertinggi menjadi berlebih. Kita simak pada rumusan Doktrin Hankam Negara, pada Bab V tentang Pokok-Pokok Penyelenggaraan Hankamneg, pada pasal Pengelolaan Hankamneg menyebutkan bahwa :

- (1) Pengelolaan Hankamneg mencakup pembinaan, pembangunan dan penggunaan;
- (2) Presiden memegang kekuasaan tertinggi TNI dan ABRI maupun atas Pengelolaan Hankamneg ;
- (3) Dalam melaksanakan pengelolaan Hankamneg, Presiden dibantu oleh :
 - (a) Wanhankamnas,
 - (b) Menhankam,
 - (c) Pangab.

Rumusan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1982 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Hakamneg, telah kehilangan hakikat dan makna nilai-nilai TNI, dan sejak itu ABRI semakin kehilangan predikat TNI. Pemahaman terhadap nilai-nilai TNI menjadi bias. Pemisahan Dephankam dengan Mabes ABRI, pemisahan posisi dan peranan Menteri Hankam dengan Pangab juga kehilangan makna. Dalam UU No 20 / 1982 tersebut, pada pasal 37 ayat (1)

secara eksplisit menempatkan **Pangab sebagai pembantu Presiden**, bahkan kemudian Pangab ditempatkan setingkat Menteri, tidak berbeda dengan bahkan di bawah posisi dan peranan Menhankam, dan juga di bawah para Menteri yang lain. Undang-Undang sebagai jabaran dari UUD 1945, menempatkan kewenangan Presiden semakin dominan, dan kewenangan Pangab semakin surut.

Dengan rumusan doktrin dan undang-undang tersebut telah menempatkan Presiden pada posisi yang **mengemban fungsi komando** dalam jajaran Tentara, karena kalimat **memegang kekuasaan tertinggi** diterjemahkan sebagai **Panglima Tertinggi**. Dalam keadaan demikian, adalah suatu yang mustahil bagi Pangab untuk dapat mengatakan tidak dalam arti berbeda pendapat dengan keputusan, kebijaksanaan dan strategi Presiden. Hakikat Panglima ABRI sebagai Panglima TNI kehilangan makna, kehilangan nilai-nilai TNI yang tertuang dalam Sapta Marga. Maka, dengan rumusan doktrin dan UU tersebut, pertanyaannya adalah apakah ABRI masih mengemban Dwifungsi ABRI ? Kiranya perlu kajian ulang terhadap kedua dokumen tersebut Doktrin Hakamneg dan UU No 20/82 agar tetap diwarnai benang emas nilai-nilai TNI dan mengalir dari Sapta Marga.

DWIFUNGSI ABRI

Dwifungsi ABRI harus dihapuskan

Dwifungsi ABRI sebagai penyebab tumbuh berkembangnya KKN korupsi, kolusi dan nepotisme. Dwifungsi ABRI penghambat proses demokrasi. ABRI harus bertanggungjawab terhadap krisis yang terjadi, baik krisis ekonomi maupun krisis kepercayaan. ABRI telah terperangkap ke dalam sistem penguasa dan menjadi pendukung pemerintah yang feodalistis otoriter. Kekuatan ABRI telah merambah ke segala bidang kehidupan masyarakat bangsa Indonesia, dan segala keresahan sosial ujungnya adalah rekayasa ABRI. Rasanya tidak ada kegiatan ABRI dalam penyelenggaraan fungsi sebagai kekuatan sosial politik yang dapat dibenarkan saat ini.

Mengapa Dwifungsi ABRI dihujat oleh beberapa pakar dan pemimpin oposisi Orde Baru ? Dengan membawa nama rakyat, berbagai hujatan yang mereka lontarkan menghiasi halaman depan berbagai media massa, menghiasi berbagai forum pertemuan yang menyatakan diri sebagai kelompok intelektual. Padahal kalau kita cermati pengetahuan mereka tentang ABRI, tentang Militer, tentang Tentara dalam suatu Negara, sangatlah minim. Lebih dari itu mereka para pakar intelektual belum pernah menghayati bagaimana menjadi anggota Tentara. Kiranya dari pengalaman empirik lebih mudah bicara atau berdiskusi tentang angkatan bersenjata, tentang tentara atau militer, dengan para pakar asing Amerika, Eropa, Asia

yang pernah menghayati kehidupan menjadi anggota Tentara.

Mengapa media massa lebih *memilih memuat hujatan* dan hal-hal yang negatif dari ABRI, dan yang positif tidak akan dimuat ? Alasannya sederhana saja. Dari pengalaman tujuh kali mewakili Lemhannas pada Lokakarya PWI, paling tidak dapat dikemukakan dua butir alasan sebagai penyebabnya.

Pertama, krisis moneter yang membawa dampak meningkatnya harga-harga kertas dan percetakan dan sepihnya periklanan, hampir saja membunuh media massa. Hujatan-hujatan terhadap pemerintah Orde Baru dan ABRI yang dipimpin Pak Harto, telah menjadi *komoditi* yang meraih pangsa pasar, oplah naik, pers bebas, rakyat haus informasi dan menjadi dewa penolong bagi survival kehidupan media massa.

Kedua, dari ratusan media massa cetak dan elektronik yang mewakili berbagai kepentingan golongan dan kelompok masyarakat, tidak satupun yang mewakili ABRI. Sungguh suatu yang naif, bahkan ironis, bahwa dalam era globalisasi yang diwarnai keterbukaan yang muatan intinya adalah komunikasi dan informasi, *ABRI tidak mampu menghidupkan* bahkan justru mematikan sarana komunikasi, sarana media massa yang dimiliki. Padahal ABRI memiliki organ penerangan sampai pada jajaran di bawah. Hal tersebut menunjukkan suatu penampilan yang *tidak profesional*, terutama dalam

penilaian terhadap kecenderungan perkembangan lingkungan strategis.

Apakah ABRI masih mengemban Dwifungsi, mengemban nilai-nilai TNI? Untuk memahami Dwifungsi ABRI, kiranya perlu kita simak ke belakang tentang Tentara dalam Negara. Pemikiran dan penalaran tentang Tentara dalam Negara, yang tidak hanya bertugas kalau musuh ancaman kekuatan bersenjata dari luar telah datang, bukanlah suatu gagasan yang lahir di Bumi Nusantara, di Indonesia. Adanya embanan tugas bagi Tentara dalam keadaan damai berawal dari pemikiran dan penalaran Napoleon Bonaparte.

Napoleon mengubah Tentara Bayaran menjadi Tentara Rakyat, hanya rakyat yang warganegara yang dapat menjadi Prajurit bagi bangsa dan negara, yang boleh membela kelangsungan hidup eksistensi bangsa dan negara. Pemikiran yang berkembang pada waktu itu, adalah bahwa para Raja cukup puas dengan Tentara Bayaran, tentara yang terampil olah senjata, yang profesional untuk memenangkan perang, tidak peduli apakah tentara tersebut warga negara atau warga asing. Tentara Rakyat yang dipimpin Napoleon memiliki motivasi dan dedikasi, jiwa semangat dan tekad pengabdian pada bangsa dan negara, lebih dari pada Tentara Bayaran yang dimiliki para Raja di Eropa waktu itu. Karena itu dapat mudah dimengerti bila

Tentara Napoleon yang jumlahnya relatif lebih kecil, dapat memenangkan setiap pertempuran dan memenangkan perang.

Pemikiran dan penalaran Napoleon juga mengubah hakikat dan makna politik dan strategi. Kalau sebelumnya para Raja memisahkan antara politik dengan strategi, memisahkan antara perang dengan damai, memisahkan antara sipil dengan militer dalam tugas negara, maka kemudian secara bertahap telah berubah pemikiran untuk memadukannya. Kalau sebelumnya damai adalah politik dan menjadi urusan sipil, sedangkan kalau perang adalah strategi dan menjadi urusan militer, maka secara bertahap para Raja, para Pemimpin Negara, dapat menerima bahkan mengembangkan pemikiran Napoleon. Perang tidak hanya didukung kekuatan militer saja, akan tetapi juga didukung oleh segenap kekuatan bangsa *national war power*. Sebaliknya kalau damai maka kekuatan militer juga digunakan untuk mendukung tujuan damai.

Pemikiran dan penalaran Napoleon kemudian dikembangkan oleh para pakar militer dan pakar tatanegara. Antara lain dapat kita simak pemikiran dan penalaran dari pakar strategi Karl von Clausewitz dan pakar tatanegara Clemenceau. Dasar pemikirannya adalah bahwa perang bukanlah urusan strategi saja akan tetapi urusan politik juga, karena itu tidak bisa kalau hanya diserahkan kepada para Jenderal saja. Para

politisi sipil harus tahu benar kemampuan militer yang dibangun dan dimiliki negara. Sebaliknya damai bukanlah urusan politik belaka, bukan urusan sipil saja, para Jenderal haruslah terlibat dan memahami benar keputusan politik. Pengembangan strategi haruslah mengalir dari keputusan politik. Bahkan ada pula yang mengembangkan pemikiran, bahwa strategi menjadi acuan pemikiran sebelum politik. Pemikiran tersebut dikembangkan di dalam teori Strategi Raya, teori *Grand Strategy*.

Melihat perkembangan hubungan politik dengan strategi, hubungan perang dengan damai, hubungan sipil dengan militer, kiranya fungsi sebagai kekuatan sosial politik yang diemban oleh ABRI adalah suatu yang wajar, suatu yang bukan gagasan Indonesia dan milik ABRI saja, tetapi sifatnya universal. Masalahnya terpulang pada rumusan konsepsi dan tatanan bagi penerapannya.

Mengapa ABRI berdwifungsi ? Ada tiga butir pemikiran dan penalaran yang kiranya dapat dikemukakan, yaitu : tentang Tentara Pejuang, Doktrin Sishankamrata, dan mencegah penggunaan kekuatan telanjang atau *the naked power*.

Tentara Pejuang. Kiranya pantas disyukuri bahwa Tentara Indonesia lahir dari rakyat. Pemerintah negara yang dibentuk setelah Proklamasi Kemerdekaan, tidak segera membentuk tentara. *Aneh, ada Negara zonder Tentara.* Tentara

Nasional Indonesia TNI adalah Tentara Rakyat, rakyatlah yang membentuk Tentara. Mengapa TNI yang juga sebagai Tentara Rakyat kemudian menyandang embanan sebagai **Tentara Pejuang** ? Pak Dirman, Panglima Besar APRI, menolak ajakan *perintah* Bung Karno, Presiden RI untuk ikut ditawan Belanda. Pak Dirman memilih melanjutkan perjuangan merebut kembali kemerdekaan dan mempertahankan kedaulatan. Peristiwa ini merupakan fenomena baru dalam hubungan politik dengan strategi, hubungan perang dengan damai, hubungan sipil dengan militer.

Kita simak kembali pemikiran dan penalaran Napoleon. Pada era waktu itu, dalam perang yang terlibat militer saja kalau tentara kalah maka pemerintah negara Raja menyerah. Bangsa dan negara yang kalah dihancurkan oleh yang menang. Napoleon yang menerima warisan penalaran dari Socrates, Plato dan Aristotle berpikir satu langkah maju, yaitu bahwa bangsa dan negara yang dikalahkan tidak dihancurkan, akan tetapi hanya Rajanya yang diganti karena itu Napoleon juga dikenal sebagai *the Kings Maker*. Tak terduga bahwa hal tersebut mengakibatkan adanya pemerintah dalam pelarian, negara hanya diwakili oleh pemerintah, karena rakyat dan wilayah dikuasai oleh pemerintah negara lain. Hal tersebut mengembangkan pemikiran bahwa untuk mempertahankan eksistensi negara, dimungkinkan adanya

pemerintah dalam keadaan darurat. Dengan bantuan negara sahabat, kemudian diorganisir suatu perlawanan bawah tanah, yang kemudian berkembang menjadi Perang Gerilya atau *Revolutionary Warfare*.

Bagaimana sikap Tentara dalam Negara, Kalau Raja dalam pelarian, kalau pemerintah dalam keadaan darurat? TNI dibawah Pak Dirman menjawab tantangan tersebut, dan berhasil. Pemikiran dan gagasan Pak Dirman dalam operasionalnya tidak sepenuhnya asli Indonesia, diilhami pula oleh pemikiran dari luar, yaitu pemikiran *Wingate* dan konsep *Wehrkreise*. Apakah Pak Dirman kemudian mengambil alih pemerintah? Tidak, Pak Dirman tetap loyal dan setia kepada PDRI pemerintah darurat. Pak Dirman mewariskan nilai-nilai TNI, yaitu bahwa politik Tentara adalah politik Negara.

Pemikiran Pak Dirman bahwa Tentara tidaklah semata-mata alat pemerintah, berulang pada saat negara Indonesia dalam bentuk Republik Indonesia Serikat. Pada saat pemerintah Bung Hatta hampir mengikuti kehendak Jenderal Spoor untuk membentuk Tentara RIS yang terdiri eksKnil, dan akan membubarkan TNI, maka Pak Dirman dengan *teguh hati* menolak pemikiran Jenderal Spoor tersebut. Kegigihan Jenderal Spoor untuk membentuk Tentara RIS dapat digagalkan oleh keteguhan hati Pak Dirman, dan TNI tetap eksis sebagai Tentara Nasional,

Tentara Rakyat, dan *Tentara Pejuang*.

Warisan nilai-nilai TNI sebagai Tentara Pejuang, yang bermakna sebagai warganegara yang *patriot* dan *kesatria*, kemudian dituangkan ke dalam rumusan Sapta Marga pada tahun 1951. Marga kesatu, kedua dan ketiga mengandung muatan butir-butir warganegara, patriot dan kesatria, yang merupakan embanan bagi fungsi sosial politik. Kemudian rumusan Sumpah Prajurit yang telah tersusun pada tahun 1948 disempurnakan, dengan merubah kalimat: *setia kepada pemerintah*, menjadi *setia kepada negara*.

Dalam era demokrasi parlementer, TNI kehilangan peranannya sebagai Tentara Pejuang. TNI semata-mata sebagai alat pemerintah. Peristiwa 17 Oktober 1952 mengandung muatan nilai sebagai patriot Indonesia, serta mengingatkan kepada pemerintah negara, bahwa pemerintah negara tidak bisa meninggalkan peran TNI. Puncak kegagalan demokrasi yang ingin diwujudkan saat itu ditandai dengan gagalnya Dewan Konstituante mencapai komitmen nasional. Kepentingan golongan masih berada di atas kepentingan nasional. Terkesan bahwa bangsa Indonesia belum memahami hakikat dan makna demokrasi. Dengan dekret Presiden tahun 1959 untuk kembali pada UUD 1945, maka kemudian TNI ABRI diakui sebagai Golongan Fungsional.

Melalui Seminar di Seskoad

Bandung pada tahun 1966, hakikat dan makna nilai-nilai TNI dirumuskan secara konkrit. Dalam era Orde Baru, tercapai komitmen nasional bahwa ABRI mengemban dua fungsi, sebagai kekuatan Hankam dan sebagai kekuatan sosial politik, yang kemudian disebut sebagai Dwifungsi ABRI. Namun kemudian, seperti telah disampaikan di depan, rumusan doktrin dan undang-undang kehilangan muatan nilai-nilai TNI. Kiranya ABRI cukup puas dengan keabsahan Dwifungsi yang diembannya, dengan perwakilan anggotanya di MPR dan DPR, dengan Kekaryaan yang dapat menempatkan anggotanya di segenap lembaga dan instansi pemerintah negara.

ABRI terkesan kurang waspada dan kurang sensitif terhadap rumusan doktrin dan undang-undang, sebagai penyempurnaan terhadap rumusan doktrin dan UU yang disusun sebelumnya. Rumusan baru yang disempurnakan justru kurang diwarnai muatan hakikat dan makna nilai-nilai TNI yang telah dirumuskan pada Seminar tahun 1966. Karena itu kalau kemudian pelaksanaan Dwifungsi ABRI menyimpang dari warisan nilai-nilai TNI, kiranya dapat dipahami.

Alasan ABRI berdwifungsi, di samping Nilai-nilai TNI, yaitu sebagai Tentara Nasional, Tentara Rakyat dan *Tentara Pejuang*, juga berangkat dari pemikiran dan penalaran *Sishankamrata* Sistem Pertahanan

Keamanan Rakyat Semesta suatu tatanan pertahanan keamanan yang telah dikaji kebenarannya dalam sejarah perjuangan, dan secara hukum berdasar dan mengalir dari pasal 30 UUD 1945. Pemikiran dan penalaran ABRI yang mengemban fungsi sebagai kekuatan sosial politik juga aktual, artinya relevan untuk dihadapkan dengan tantangan masa depan, yaitu mencegah digunakannya *the Naked Power* kekuatan bersenjata secara telanjang. Tentang *Sishankamrata* dan *naked power* akan disampaikan pada butir-butir berikutnya.

ABRI KEMBALI KE BARAK

Tinggalkan peranan ABRI sebagai kekuatan sosial politik, yang membuat rakyat sesak napas. ABRI adalah Tentara, ABRI adalah Militer, yang tugasnya menjaga kemerdekaan dan kedaulatan bangsa dan negara. ABRI adalah kekuatan Hankam yang harus menjaga pagar negara. ABRI harus kembali ke barak, dan berlatih kemampuan militer, meningkatkan profesionalisme di bidangnya. Serahkan kewenangan sipil kepada sipil, untuk mewujudkan masyarakat madani, *civil society*. Dalam masyarakat bangsa yang modern haruslah mengenal tatanan yang membagi tugas dan fungsi secara jelas *division of labor*. ABRI telah berkembang bagaikan ikan gurita yang tangan-kakinya merambah ke segenap kolam air, membuat rakyat

sebagai air terdesak dan sesak napas. *Terompet apel* tentara harus segera dikumandangkan, untuk memanggil segenap Prajurit ABRI kembali ke kandang, kembali ke barak tentara.

Hujatan-hujatan yang meneriakkan agar ABRI kembali ke barak tidak kalah maraknya dengan isu hujatan yang lain. Reaksi emosi manusiawi tentulah beda antara membaca media cetak atau mendengar dari media elektronik tentang berbagai hujatan tersebut di rumah, dibandingkan dengan mendengar langsung pada suatu forum pertemuan. Beda pula hadir di forum pertemuan sebagai peserta, dengan hadir sebagai panelis yang membawakan makalah dengan topik yang ditentukan penyelenggara. Namun apapun topiknya, apapun isi makalahnya, tidak menjadi perhatian para peserta forum pertemuan, hujatan tetap pada substansi yang itu-itu juga, yang dicoba untuk terhimpun pada tujuh tantangan dalam tulisan ini.

Topik yang diminta ke Lemhannas, biasanya terkait dengan konsepsi Wasantara dan Tannas, sebagai paradigma bagi topik yang diminta panitia. Pengalaman menunjukkan bahwa tidak ada satupun peserta forum pertemuan yang menanggapi konsepsi Wasantara dan Tannas. Apakah Lemhannas masih melanjutkan upaya kajian doktrin Wasantara dan Tannas? Belum lama ini akhir September 1998 suatu semi-

nar yang diselenggarakan oleh Lemhannas sendiri lebih memilih topik Wawasan Kebangsaan daripada Wasantara dan Tannas.

Sebagai purnawirawan ABRI tentulah masih memiliki naluri, nalar dan nurani untuk membela ABRI. Mencoba untuk masih berpikir logik, namun demikian tetap menyadari bahwa upaya tersebut akan menghadapi risiko. Dari luar, sudah apriori bahwa meskipun purnawirawan ABRI apalagi masih bertugas di Lemhannas yang terkesan sebagai Lembaga ABRI tentu akan membela ABRI. Tentu akan bersikap defensif dan tidak laku bagi komoditi media massa saat ini. Dari dalam, belum tentu mendapat tanggapan positif, karena ada butir-butir pandangan yang mungkin berbeda terhadap berbagai kritik dan hujatan tersebut, bahkan ada pandangan yang tidak sepenuhnya menolak hujatan-hujatan tersebut. Sebagai purnawirawan dan pengamat Hankam, mencoba menyajikan pemikiran dan penalaran yang obyektif dan konstruktif. Keadaan ABRI tidaklah seburuk seperti yang dipersepsikan di atas. Di sisi lain masih dapat melihat bahwa beberapa substansi kritik dan hujatan mengandung kebenaran.

Sishankamrata. Mengapa satuan-satuan ABRI tidak seluruhnya berada di barak tentara? Mengapa satuan-satuan ABRI tidak disusun ke dalam komando tempur saja, yang berada di barak-barak tentara?

Mengapa ada satuan komando teritorial yang berada di luar barak ? Ada pula satuan komando intelijen, komando sosial politik, komando kekaryaan, komando Menwa, yang posisi dan tempatnya bukan di mana tetapi dimana-mana. Kalau berdampak positif tentulah tidak dipertanyakan. Bagi mereka yang menerima dampak positif, tentulah berkesan positif pula. Tetapi bagi yang menerima dampak negatif, tentulah bersikap lain.

Dalam era reformasi yang memberi kebebasan bersuara, merupakan suatu peluang baik bagi mereka yang selama ini menerima dampak negatif dan dalam kondisi tertekan. Setelah sekian lama tertekan, maka berubah menjadi ledakan emosional berupa hujatan. Dari logika ini pemikiran dan penalaran berangkat, kalau naluri dan nalar terbelenggu oleh obsesi, mungkin nurani masih dapat peluang untuk keluar dari perangkap obsesi. Menguak kesadaran betapa ABRI bersama Orde Baru menciptakan bangsa yang terkotak.

Dalam suatu seminar, seorang peserta mengemukakan pendapatnya, sebagai berikut : tekanan terberat terjadi pada kampanye Pemilu tahun lalu, dan ledakan terjadi pada medio Mei tahun ini. Sebagai contoh kita angkat dua daerah, Surakarta dan Yogyakarta, yang mengemban budaya tradisional. Mengapa ledakan medio Mei '98 menghancurkan Surakarta, tetapi

tidak bagi Yogyakarta. Kita tahu Jawa Tengah, terutama Surakarta dan Yogyakarta, merupakan barometer *kelenturan* rakyat Indonesia, dalam menerima tekanan.

Surakarta merupakan bagian dari propinsi Jawa Tengah. Gubernur Jateng dari ABRI aktif atau purnawirawan tetap ABRI mencaangkan kuningisasi wilayah Jateng, tidak termasuk Yogya yang propinsi sendiri dan istimewa. Kuningisasi merupakan upaya untuk memenangkan Pemilu bagi kepentingan Golkar, tak ada pilihan lain bagi ABRI kecuali mendukungnya dengan mengerahkan segala komandonya, teritorial, sospol, intelijen, dan yang lain. Rakyat Jateng merasa tertekan oleh ABRI, Gubernur ABRI, Ketua DPRD ABRI, Walikota ABRI beserta segenap aparatnya. Tekanan untuk mendapat dukungan dana kampanye, dan tekanan untuk mencoblos Golkar. Maka berkembang pemikiran : kalau kemarin Rakyat tak berdaya, maka sekaranglah di era reformasi ini saatnya Rakyat menuntut ABRI kembali ke barak.

Kalau kita renungkan, memang pandangan tersebut mengandung kebenaran. Yang kemudian menjadi renungan pemikiran adalah : apakah langkah-langkah yang dilakukan oleh ABRI beserta jajarannya tersebut merupakan implementasi, merupakan penerapan atau operasionalisasi dari Sishankamrata ? Yaitu mengerahkan kekuatan ABRI

bersama kekuatan rakyat untuk menghadapi ancaman terhadap tercapainya mayoritas Golkar. Kalau tidak, tentu saja langkah-langkah yang dilakukan ABRI merupakan penyimpangan dari doktrin Sishankamrata, menyimpang dari nilai-nilai yang terkandung di dalam Dwifungsi ABRI. **Sishankamrata sarat mengandung embanan dwifungsi ABRI.** Mengapa Gubernur Jateng yang menerapkan Sishankamrata diganti, oleh ABRI juga? Meskipun naluri dan nalar masih terobsesi untuk membela ABRI, namun kiranya masih ada nurani yang bisa memahami dan menerima berbagai kritik yang disampaikan dalam bentuk hujatan tersebut.

Sishankamrata sistem pertahanan keamanan rakyat semesta adalah rumusan konsepsi bangsa Indonesia dalam upaya pertahanan keamanan negara. Konsepsi tersebut merupakan teori yang di satu sisi diangkat dari pengalaman empirik, pengalaman perjuangan bangsa Indonesia dalam upaya merebut kemerdekaan dan mempertahankan kedaulatan, karena itu merupakan teori yang telah dikaji kebenarannya di lapangan. Di sisi lain, sebagai teori dilandasi oleh pandangan bangsa tentang perang dan damai; cinta damai tetapi lebih cinta kemerdekaan serta dilandasi dan mengalir dari pasal 30 UUD 1945 setiap warga-negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pembelaan negara.

Rumusan Sishankamrata adalah

konsepsi **modern** dan **tetap relevan** menghadapi tantangan masa kini dan masa depan. Modern dan relevan dihadapkan kepentingan segenap aspek kehidupan bangsa. Secara ideologi politik, Sishankamrata tidak berpenampilan *war monger*, tidak agresif, serta bersifat demokratis di mana segenap masyarakat bangsa dilibatkan. Secara **ekonomi** memenuhi syarat efektif dan efisien dalam penggunaan sumber daya nasional, sejalan dengan eskalasi ancaman yang sedang dan akan dihadapi. Secara **sosial budaya** mengutamakan upaya pembinaan damai dan mencegah perang, mengedepankan upaya preventif diplomasi untuk mengakomodasikan konflik bagi terwujudnya keamanan bersama, dan menghindari pakta militer yang bercorak perilaku menghadapi satu kekuatan dengan kekuatan yang lain. Secara **Hankam** merupakan paduan kekuatan yang canggih dengan kekuatan yang sederhana *hi lo mix* dalam keadaan damai dipelihara kekuatan kecil dengan teknologi tinggi, dalam keadaan perang dapat dengan cepat dikembangkan kekuatan rakyat semesta dengan teknologi rendah.

Kalau perang maka akan dilakukan dengan Perang Rakyat Semesta PERATA kalau damai maka dipelihara kekuatan kecil ABRI. Tetapi ABRI bukanlah pemadam kebakaran, memelihara damai dan mencegah perang tidaklah menunggu setelah ancaman datang. Karena itu ruang,

alat dan kondisi juang harus disiapkan sedini mungkin. Tata ruang wilayah harus dibangun tidak hanya memperhatikan kepentingan kesejahteraan saja, tetapi juga harus memperhatikan kepentingan keamanan. Komponen-komponen kekuatan dalam Sishankamrata menuntut kesiapan rakyat, untuk itu ABRI sebagai kekuatan utama bertugas untuk menyiapkan dan melatih rakyat. Pembangunan sarana prasarana di segala sektor kehidupan bangsa haruslah juga memperhatikan kepentingan keamanan.

Untuk itu struktur komando ABRI disusun dalam dua jalur komando: ***komando tempur*** dan ***komando teritorial***. Kalau penentuan arah Pembangunan Nasional melibatkan ABRI yang duduk di MPR /DPR, maka komando teritorial terlibat dalam pembangunan daerah, terlibat dalam penyelenggaraan politik dan strategi daerah. Sishankamrata membantu sektor kegiatan pembangunan agar mengandung muatan kepentingan keamanan dan kesejahteraan, sehingga di setiap wilayah akan terwujud kondisi ***keamanan yang sejahtera*** sekaligus ***kesejahteraan yang aman***. Komando teritorial tidak hanya mendukung kelancaran pembangunan, namun lebih dari itu haruslah memberi andil dari sisi kepentingan keamanan. Andil dalam pembangunan dari sisi kepentingan keamanan tersebut merupakan penerapan dari peranan ABRI sebagai kekuatan sosial.

HANKAM TANGUNGJAWAB ABRI

Hankam bukan lagi pelindung rakyat. Hankam telah menakutkan rakyat. Konotasi Hankam menampilkan sosok yang seram di mata dan di hati rakyat. Berhadapan dengan hankam membuat mata terpejam dan hati berdebar. Tak ada kritik konstruktif bagi Hankam, semua kritik terhadap Hankam dipandang sebagai kritik destruktif, bahkan subversif. ABRI harus bertanggungjawab terhadap semua ini. ABRI harus melepaskan segenap atribut yang membuat seram dan menakutkan rakyat. Intelijen telah membuat hati rakyat surut, Teritorial telah membuat kantong menciut, dan sosial politik telah membuat bangsa dan negara bangkrut. Kembalikan ABRI sebagai Tentara, sebagai Militer yang profesional.

Apakah memang sudah seburuk itu kelakuan ABRI? Sehingga pantas menerima hujatan dan gugatan yang kemudian menjadi ***komoditi yang laku*** keras dan menemukan ***pangsa pasar*** yang menjadi dewa penolong bagi media massa yang nyaris bangkrut di era krisis ekonomi. Suatu fenomena yang membawa nuansa pembenaran beban tekanan ABRI terhadap aspirasi kelompok yang selama ini tertekan. Kalau kelompok tertekan menyimpan dendam dan saat ini kesempatan melepas dendam dengan hujatan, apakah nanti pada waktunya, ABRI dapat

menahan diri untuk tidak melepas dendamnya? Apakah kelompok yang ikut menekan bersama ABRI kini ikut memojokkan ABRI?

Mengapa cerita Orde Baru yang disutradari oleh ABRI berakhir tragis? Ketika malam semakin hening, tak kuasa menahan mata hati melayang memandang teman-teman yang tampil di panggung Orde Baru. Apakah memang demikian buruk penampilan teman-teman yang memegang peran penting di atas panggung dalam lakon Orde Baru? Adakah pilihan skenario lain, bila Tuhan Yang Maha Pengasih lagi Penyanyang, meridoi memutar waktu kembali. Tiada sesal yang tiba duluan, ataukah bebal menjadi pilihan.

"*Naked Power*" Kiranya suatu karunia ketika ABRI menerima embanan fungsi sosial politik. Ketika dunia semakin ingin damai, kepentingan kemanusiaan semakin meningkat, sebanding bahkan adakalanya melebihi kepentingan nasional. Sungguh tidak etis dan tidak bermoral, bila Tentara Rakyat menggunakan senjata telanjang *naked power* bedil dan sangkur kepada rakyat. Jangankan ditujukan kepada rakyat bangsa lain, apalagi kepada rakyat sendiri. Demikian pula, peristiwa 17 Oktober 1952, di mana senjata telanjang dihadapkan ke Istana Negara, tentulah dipandang sebagai pengalaman yang jangan terulang. Sungguh suatu karunia yang pantas disyukuri, ketika ABRI

menerima warisan embanan sebagai kekuatan sosial politik, karena dengan embanan tersebut **ABRI dapat keluar** dalam tugas membina dan memelihara stabilitas nasional, tanpa harus menggunakan senjata telanjang, embanan sebagai kekuatan Hankam.

Seharusnya *Dwifungsi* ABRI merupakan *jawaban tepat* bagi dunia tentara dunia militer yang sedang menghadapi keadaan yang dilematis. Pada saat eskalasi ancaman dalam negeri telah melampaui kemampuan dari aparat yang mengemban fungsi penegakan hukum, maka tentara harus menghadapi eskalasi ancaman yang para pelakunya adalah rakyat sendiri. Maka dunia tentara menghadapi ancaman yang saat ini berkembang dengan sebutan *unconventional military threat* atau *nontraditional military threat*. Tentara di berbagai dunia menghadapi musuh yang berupa huru-hara dan kerusuhan masal, yang bukan seperti yang digambarkan sebagaimana tertulis di dalam doktrinnya di dalam *the enemy book*. Kepentingan kemanusiaan, yang kemudian mencuat dengan isu hak asasi manusia, telah mampu mengangkat tindakan tentara yang menggunakan kekuatan senjata terhadap rakyat sipil menjadi opini dunia yang negatif.

Peristiwa Tian Anmen sampai kini masih sering diangkat menjadi agenda politik oleh Amerika dalam pertemuan dengan Cina.

alat dan kondisi juang harus disiapkan sedini mungkin. Tata ruang wilayah harus dibangun tidak hanya memperhatikan kepentingan kesejahteraan saja, tetapi juga harus memperhatikan kepentingan keamanan. Komponen-komponen kekuatan dalam Sishankamrata menuntut kesiapan rakyat, untuk itu ABRI sebagai kekuatan utama bertugas untuk menyiapkan dan melatih rakyat. Pembangunan sarana prasarana di segala sektor kehidupan bangsa haruslah juga memperhatikan kepentingan keamanan.

Untuk itu struktur komando ABRI disusun dalam dua jalur komando: ***komando tempur*** dan ***komando teritorial***. Kalau penentuan arah Pembangunan Nasional melibatkan ABRI yang duduk di MPR /DPR, maka komando teritorial terlibat dalam pembangunan daerah, terlibat dalam penyelenggaraan politik dan strategi daerah. Sishankamrata membantu sektor kegiatan pembangunan agar mengandung muatan kepentingan keamanan dan kesejahteraan, sehingga di setiap wilayah akan terwujud kondisi ***keamanan yang sejahtera*** sekaligus ***kesejahteraan yang aman***. Komando teritorial tidak hanya mendukung kelancaran pembangunan, namun lebih dari itu haruslah memberi andil dari sisi kepentingan keamanan. Andil dalam pembangunan dari sisi kepentingan keamanan tersebut merupakan penerapan dari peranan ABRI sebagai kekuatan sosial.

HANKAM TANGUNGJAWAB ABRI

Hankam bukan lagi pelindung rakyat. Hankam telah menakutkan rakyat. Konotasi Hankam menampilkan sosok yang seram di mata dan di hati rakyat. Berhadapan dengan hankam membuat mata terpejam dan hati berdebar. Tak ada kritik konstruktif bagi Hankam, semua kritik terhadap Hankam dipandang sebagai kritik destruktif, bahkan subversif. ABRI harus bertanggungjawab terhadap semua ini. ABRI harus melepaskan segenap atribut yang membuat seram dan menakutkan rakyat. Intelijen telah membuat hati rakyat surut, Teritorial telah membuat kantong menciut, dan sosial politik telah membuat bangsa dan negara bangkrut. Kembalikan ABRI sebagai Tentara, sebagai Militer yang profesional.

Apakah memang sudah seburuk itu kelakuan ABRI? Sehingga pantas menerima hujatan dan gugatan yang kemudian menjadi ***komoditi yang laku*** keras dan menemukan ***pangsa pasar*** yang menjadi dewa penolong bagi media massa yang nyaris bangkrut di era krisis ekonomi. Suatu fenomena yang membawa nuansa pembenaran beban tekanan ABRI terhadap aspirasi kelompok yang selama ini tertekan. Kalau kelompok tertekan menyimpan dendam dan saat ini kesempatan melepas dendam dengan hujatan, apakah nanti pada waktunya, ABRI dapat

menahan diri untuk tidak melepas dendamnya? Apakah kelompok yang ikut menekan bersama ABRI kini ikut memojokkan ABRI?

Mengapa cerita Orde Baru yang disutradari oleh ABRI berakhir tragis? Ketika malam semakin hening, tak kuasa menahan mata hati melayang memandang teman-teman yang tampil di panggung Orde Baru. Apakah memang demikian buruk penampilan teman-teman yang memegang peran penting di atas panggung dalam lakon Orde Baru? Adakah pilihan skenario lain, bila Tuhan Yang Maha Pengasih lagi Penyanyang, meridiol memutar waktu kembali. Tiada sesal yang tiba duluan, ataukah bebal menjadi pilihan.

"*Naked Power*" Kiranya suatu karunia ketika ABRI menerima embanan fungsi sosial politik. Ketika dunia semakin ingin damai, kepentingan kemanusiaan semakin meningkat, sebanding bahkan adakalanya melebihi kepentingan nasional. Sungguh tidak etis dan tidak bermoral, bila Tentara Rakyat menggunakan senjata telanjang *naked power* bedil dan sangkur kepada rakyat. Jangankan ditujukan kepada rakyat bangsa lain, apalagi kepada rakyat sendiri. Demikian pula, peristiwa 17 Oktober 1952, di mana senjata telanjang dihadapkan ke Istana Negara, tentulah dipandang sebagai pengalaman yang jangan terulang. Sungguh suatu karunia yang pantas disyukuri, ketika ABRI

menerima warisan embanan sebagai kekuatan sosial politik, karena dengan embanan tersebut **ABRI dapat keluar** dalam tugas membina dan memelihara stabilitas nasional, tanpa harus menggunakan senjata telanjang, embanan sebagai kekuatan Hankam.

Seharusnya *Dwifungsi* ABRI merupakan *jawaban tepat* bagi dunia tentara dunia militer yang sedang menghadapi keadaan yang dilematis. Pada saat eskalasi ancaman dalam negeri telah melampaui kemampuan dari aparat yang mengemban fungsi penegakan hukum, maka tentara harus menghadapi eskalasi ancaman yang para pelakunya adalah rakyat sendiri. Maka dunia tentara menghadapi ancaman yang saat ini berkembang dengan sebutan *unconventional military threat* atau *nontraditional military threat*. Tentara di berbagai dunia menghadapi musuh yang berupa huru-hara dan kerusuhan massal, yang bukan seperti yang digambarkan sebagaimana tertulis di dalam doktrinnya di dalam *the enemy book*. Kepentingan kemanusiaan, yang kemudian mencuat dengan isu hak asasi manusia, telah mampu mengangkat tindakan tentara yang menggunakan kekuatan senjata terhadap rakyat sipil menjadi opini dunia yang negatif.

Peristiwa Tian Anmen sampai kini masih sering diangkat menjadi agenda politik oleh Amerika dalam pertemuan dengan Cina.

Pembantaian terhadap 56 orang warga sipil di Waco, Texas, Amerika Serikat, oleh Tentara setempat, menjadi berita utama sehari-hari di CNN. Peristiwa anarki di Albania, menjadi masalah yang rumit bagi Tentara Perancis, Jerman, dan Italia yang akan membantu untuk meredam. Peristiwa Albania kini berkembang di Kosovo.

Dengan embanan fungsi sosial politik, maka ABRI dapat keluar tanpa membawa senjata telanjang, tanpa kekuatan Hankam, dalam menghadapi berbagai gejolak sosial. Dengan demikian maka pendekatan keamanan yang diselenggarakan oleh ABRI akan tetap dalam batas kepentingan kemanusiaan, dan terhindar dari pelanggaran hak asasi manusia. Kemudian dalam penyelenggaraan embanan fungsi sosial politik tersebut, haruslah dalam tatanan sistem politik yang tetap menjaga dan menegakkan asas-asas demokrasi.

Di mana letak kesalahan penerapan Dwifungsi ABRI? ABRI menciptakan ujung tombak kembar dalam mengemban Dwifungsi, mengemban kekuatan Hankam dan kekuatan Sospol. Sewaktu reorganisasi ABRI tahun 1984, kepada Pangab diberikan wadah pemikiran yang akan membantu Pangab dalam mengemban Dwifungsi ABRI, wadah tersebut adalah Kasum Kepala Staf Umum dan Kassospol Kepala Staf Sosial Politik. Suasana batin yang tersirat

waktu itu, bahwa pemikiran kedua embanan fungsi tersebut diharapkan dapat mengalir ke segenap komando jajaran ABRI, namun bukan dalam bentuk dan wujud wadah organisasi. Kalau diwujudkan dalam bentuk organisasi bukan pemikiran saja maka kemudian akan menuntut terpenuhinya elemen-elemen militer, yaitu: doktrin, rekrutmen, peralatan senjata, dan anggaran, yang terpisah dan berjalan sendiri-sendiri.

Ketika Korem dan Kodim juga memiliki organ Sospol, maka ABRI telah menciptakan *ujung tombak* kembar. Kedua ujung tombak tersebut masing-masing mengatur sendiri elemen-elemen militer yang dibutuhkan. Karena itu bila suatu mata rantai komando kurang memiliki kemampuan kendali yang diperlukan, baik yang *tangible* maupun yang *in-tangible*, maka ujung tombak kembar tersebut sering keluar bersamaan, berebut prestasi dan lahan. Benturan keduanya membuat masyarakat menjadi tertekan dan terdesak. Seyogyanyalah bahwa pemikiran dan penalaran Pangab dalam mengemban Dwifungsi, mengalir dalam pemikiran dan penalaran para komandan teritorial, tetapi bukan diwujudkan dalam bentuk organisasi konkrit yang terpisah dan memiliki dan mengatur elemen-elemen militer sendiri-sendiri.

Nilai-nilai TNI yang mewariskan embanan sebagai kekuatan sosial politik dalam makna yang luas, kemudian berubah dan menyimpang

menjadi kekuatan sosial politik dalam arti sempit. Ujung tombak kembar, terutama ujung tombak sosial politik, dimanfaatkan hanya untuk kepentingan politik praktis. Embanan suksesnya Pemilu menjadi kepentingan memenangkan Pemilu, memenangkan suatu golongan tertentu, dan ABRI tidak mampu menjaga jarak yang sama terhadap segenap kekuatan sosial politik yang ada.

Apakah memang demikian naif pemikiran ABRI? Apakah tanpa nalar yang dapat diterima akal sehat? Untuk itu perlu kita tengok kebelakang, Pelita demi Pelita sejak awal 1978. Kita ingat betul bahwa diperlukan proses panjang, perlu tiga Pelita perlu **15 tahun**, sehingga semua kekuatan organisasi sosial politik mau **menerima Pancasila** sebagai satu-satunya asas dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. ABRI tidak akan pernah kompromi untuk yang satu ini. ABRI akan selalu di garis depan untuk membela dan mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. ABRI tentu ingin menjaga jarak yang sama dengan mitra-mitra yang seperjuangan untuk mewujudkan cita-cita nasional. Sebaliknya ABRI akan menjaga jarak yang berbeda dengan mitra-mitra yang berbeda cita-cita.

Namun, seperti telah diungkap di depan, hal-hal positif dari ABRI sukar mendapat tempat, telah tertimbun

oleh hal-hal yang negatif. Opini yang berkembang sudah sukar untuk mampu melihat yang positif dari ABRI. Apakah benar demikian banyak yang negatif, sehingga sukar menguak yang positif? Masalah ini haruslah mendapat tempat pertama dalam upaya kaji ulang, agar niat baik untuk mengalah tidak terjebur ke tempat salah.

Kalau kebenaran dalam rido Tuhan, teguh hati Pak Dirman dapat diulang. Kalau kebenaran meragukan, niat mengalah dapat dikedepankan. Kalau wujud wadah embanan Sospol memang menyimpang, segenap organ Sospol sebaiknya dihapuskan. Pengabdian dalam mengemban peran sosial politik tetap dilanjutkan, tanpa wadah dan dekorasi Dwifungsi yang telah menjadi hujatan. ABRI memang sedang dihujat, dan ABRI cukup dewasa untuk tidak malu mengalah. Namun demikian ABRI tetap mengemban tugas pokok yang sarat dengan muatan politik, yaitu kelangsungan hidup bangsa dan negara : merdeka, bersatu dan berdaulat, serta melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah.

POLRI KELUAR DARI ABRI

Mengapa Polri masih dipertahankan di dalam ABRI? Polisi itu Sipil bukan Tentara. Kekeliruan dan penyimpangan harus dihentikan. ABRI telah memanfaatkan Polri untuk memasuki kehidupan sipil, untuk

melestarikan Dwifungsi. Polri sebagai aparat hukum telah dikebiri oleh ABRI, karena itu tatanan hukum tidak dapat ditegakkan. **Sama saja bohong**, pernyataan Pangab bahwa Polri dikeluarkan dari ABRI tetapi tetap dibawah Dephankam, padahal Pangab juga merangkap sebagai **Menhankam**.

Kalau hujatan itu datang dari para tokoh pakar sipil yang anti ABRI, kiranya masih dapat dimaklumi. Tetapi kiranya perlu tanggapan balik yang dingin tetapi secara serius bila hujatan itu datang juga dari Senior ABRI yang pernah duduk pada jabatan tinggi.

Bila pikiran telah bisa mendinginkan hati, bila nalar akal sehat telah kembali, sebenarnya tidak sukar membedah organisasi ABRI, bahkan organisasi Angkatan Bersenjata secara universal. Anak-anak ABRI, satuan-satuan dalam keluarga ABRI masing-masing memiliki organ-organ yang lengkap, kepala badan kaki tangan jantung paru-paru sendiri-sendiri, mereka **bukanlah kembar Siam**, yang pemisahannya perlu operasi. Seperti telah disampaikan di depan, organisasi ABRI disusun berdasar tetrahidron. Setiap bagian, Batalyon-Armada Skuadron, dapat dilepas, dicopot, digeser dan diganti, dengan prosedur yang sangat mudah. Suatu Batalyon dapat dilepas dan kemudian ditempatkan sebagai Satuan Garuda yang berada dibawah Komando Pasukan Perdamaian Internasional.

Itu Batalyon, apalagi suatu Angkatan, suatu Polri, jangankan minggu depan hari ini juga dapat dilepas.

Kalau Pangab melepas Polri hari ini, baik dari jajaran ABRI maupun jajaran Dephankam, apakah Pangab dapat dikatakan bertanggungjawab. Masalahnya adalah apakah Pangab tidak **melanggar tatanan hukum** yang berlaku, melanggar UU yang masih berlaku. Apakah Polri dilepas tanpa ditempatkan pada salah satu suprastruktur dalam tatanan negara. Suprastruktur yang akan menerima bukanlah bawahan Pangab, tentu suprastruktur ditanya dahulu apakah mau menerima. Hal tersebut perlu dilakukan, karena sudah diluar kewenangan Pangab, agar tidak akan dihujat dibelakang hari nanti. Bukan sekedar mengirim kue ke tetangga. Ya kalau tetangga merasa dikirim kue ulang tahun yang enak, siapa tahu tetangga berpikir lain, memandang lain, yang serba negatif, kiriman kue dilihat sebagai membuang limbah. Pangab memang sedang dalam posisi terpojok, berbuat baikpun dipandang salah. Opini yang sedang berkembang saat ini tetap saja akan melihat penjelasan tersebut sebagai suatu upaya rekayasa dan upaya defensif yang ingin membenaran diri pihak ABRI, selalu dilihat dari opini negatif.

Berbicara tentang **Tentara dalam Negara**, yang sudah ada sejak masyarakat membentuk negara, tentu ingin pula tahu sejak kapan **Negara punya Polisi**. Pada zaman

dahulu, zaman kerajaan sebelum Napoleon, semua kepentingan keamanan yang diemban Raja diselenggarakan oleh Tentara. Tentara adalah alat kekuasaan Raja untuk menegakkan negara, untuk merdeka, bersatu dan berdaulat, bahkan untuk adil dan makmur, menurut visi Raja. Ucapan Raja adalah hukum, dan **Tentara** tentara bayaran adalah penegak hukum. Tugas Tentara tidak hanya perang, tidak hanya mempertahankan kemerdekaan dan kedaulatan negara, tetapi kelangsungan hidup bangsa dan negara dalam arti luas. Tentara juga untuk menarik pajak dan mengadili yang melanggar hukum Raja. Tentara pada zaman itu melaksanakan segenap fungsi keamanan nasional.

Pemikiran dan penalaran untuk membagi fungsi-fungsi keamanan nasional diacu dan diawali oleh pemikiran dan penalaran Napoleon yang dituangkan ke dalam *Code Civil* dan *Code Penal*. Sekarang yang berlaku secara universal, keamanan nasional dibagi ke dalam empat fungsi, yaitu : (1) keselamatan bangsa, (2) pertahanan negara, (3) penegakan hukum dan ketertiban umum, dan (4) perlindungan masyarakat. Masing-masing fungsi memiliki piranti dan sarana bagi penyelenggaraan fungsi-fungsi tersebut.

Fungsi *Keselamatan Bangsa* memiliki piranti berupa Falsafah Bangsa yang kemudian dituangkan

ke dalam Konstitusi atau UUD. Sarana yang digunakan adalah segenap kelembagaan dan institusi yang diatur dalam konstitusi, yang mencakup segenap aspek-aspek kehidupan bangsa.

Fungsi *Pertahanan Negara* memiliki piranti Ideologi Negara yang kemudian dituangkan ke dalam doktrin dan undang-undang, di mana keduanya menjadi landasan dalam merumuskan politik dan strategi pertahanan negara. Sarana yang digunakan adalah Tentara, yang disusun dalam suatu sistem tentara berdasarkan rumusan doktrin dan undang-undang.

Fungsi *Penegakan Hukum* dan *Ketertiban Umum* memiliki piranti berupa segenap peraturan perundang-undangan yang mengalir dari konstitusi sebagai dasar negara. Sarananya adalah segenap aparat penegak hukum dan aparat ketertiban umum.

Fungsi *Perlindungan Masyarakat* memiliki piranti Rasa Kesetiakawanan Sosial dan Kesadaran terhadap Lingkungan Hidup yang dituangkan ke dalam berbagai tatanan dan ketentuan yang tersurat dan tersirat. Sedangkan sarananya adalah Satuan Linmas yang sekarang masih bernama Hansip yang terdiri dari : Badan SAR, PMI, Pemadam Kebakaran, LSM, Rumah Sakit, Panti Asuhan, Lembaga Pemasyarakatan, dan lain sebagainya.

Berangkat dari pemikiran Napoleon, Tentara yang semula mengurus segenap fungsi Keamanan Nasional, kemudian dipikirkan bahwa Tentara tidak lagi mengurus fungsi Penegakan Hukum dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat. Tentara sebagai sarana Pertahanan Negara bagi kelangsungan hidup bangsa dan negara, akan lebih diperlukan dan lebih bermanfaat bila dilibatkan ke dalam fungsi Keselamatan Bangsa yang sarat dengan muatan politik. Dari pemikiran ini, yang semula politik dengan strategi terpisah, politik urusan sipil dan strategi urusan militer, kemudian menjadi terpadu. Pemikiran semakin berkembang sejalan dengan perkembangan di mana antara perang dengan damai juga semakin sukar dipisahkan.

Bagaimana perkembangan Tentara dalam Negara di Indonesia? Kita simak saja selama era Orde Baru, selama tiga dekade terakhir. Seperti disampaikan di atas bahwa piranti yang mengatur adalah doktrin dan undang-undang. Piranti yang mengatur tatanan pertahanan keamanan negara saat ini dituangkan ke dalam rumusan Doktrin Hankamneg dan UU No 20 / 82. Dari kedua rumusan tersebut terkesan bahwa semua fungsi Hankam pertahanan keamanan menjadi urusan dan tanggungjawab ABRI. Hal tersebut di satu sisi mengakibatkan beban ABRI menjadi berat, dan di sisi lain lembaga dan instansi di luar ABRI kehilangan tanggungjawab

terhadap masalah Hankam. Segala hal yang berbau Hankam dilempar ke ABRI.

Bagaimana kaitannya dengan Polri, yang akan lepas dari ABRI? Dalam mengatur penyelenggaraan Hankam, kedua piranti doktrin dan UU, membagi dua upaya, yaitu upaya pertahanan dan upaya keamanan. Upaya pertahanan untuk menghadapi musuh atau ancaman dari luar, sedangkan upaya keamanan untuk menghadapi musuh atau ancaman dari dalam negeri. Secara implisit ditangkap bahwa musuh dari luar akan dihadapi oleh Tentara, dan musuh dari dalam akan dihadapi oleh Polri yang didukung oleh Tentara.

Untuk menghadapi musuh atau ancaman dalam negeri, kita mengenal konsep Keamanan Dalam Negeri dan konsep Keamanan Ketertiban Masyarakat. Piranti keras atau sarana untuk penyelenggaraan Hankam sesuai doktrin dan UU, dibagi dalam empat komponen, yaitu: Ratih, ABRI, Linmas, dan Pendukung. Bagaimana pembinaan: pembangunan dan penggunaan, komponen-komponen tersebut dalam menghadapi spektrum ancaman, akan diatur dalam undang-undang yang sampai sekarang belum diterbitkan. Kiranya justru bersyukur bahwa jbaran UU No 20/82 belum diterbitkan. Dengan melihat perkembangan yang memerlukan reformasi ABRI, maka kedua piranti yaitu Doktrin Hankamneg dan UU No 20/82 kiranya perlu penyempurnaan

Reformasi mengandung hakikat perubahan dengan makna perubahan yang lebih baik dari sebelumnya dalam menghadapi masa depan. Untuk memahami pemikiran dalam upaya reformasi ABRI, kiranya perlu kita simak pengetahuan tentang bagaimana membangun suatu Tentara dalam Negara. Ada empat elemen utama kalau ingin membangun Tentara yaitu : (1) doktrin, (2) rekrutmen, (3) peralatan senjata, dan (4) anggaran. Tentara, Militer, Angkatan Perang, atau Angkatan Bersenjata, nyaris peka nyaris sensitif dalam mengelola empat elemen tersebut. Tentara tidak ingin ada orang luar yang mencampuri. Orang luar tidak berarti semua yang bukan Tentara, semua yang Sipil. Bisa saja yang Sipil dianggap orang dalam, bila memang memahami dan menghayati kehidupan Tentara, kehidupan Militer, yang kemudian diakui sebagai orang dalam.

Doktrin. Menjadi landasan jiwa semangat dan tekad Tentara. Mengalir dari ideologi negara, mengalir dari pandangan bangsa tentang perang dan damai, mengalir dari endapan pengalaman perjuangan yang berupa nilai-nilai yang masih relevan dalam menghadapi tantangan masa depan. Dengan berbagai acuan tersebut disusun sistem tentara beserta segenap komponen-komponennya. Kekuatan yang dibangun harus jelas siapa yang mengendalikan dan bertanggungjawab. Doktrin mengatur

pokok-pokok pembinaan damai dan penyelenggaraan perang. Rumusan doktrin akan menjadi acuan dan mendasari bagi rumusan undang-undang, bukan sebaliknya.

Rekrutmen. Ini masalah manusia, elemen utama Tentara *the man behind the gun*. Tentara mencari masukan sendiri, dengan persyaratan yang ditentukan oleh Tentara. Bisa terkait dengan pendidikan umum, tetapi pendidikan militer diatur oleh Tentara sendiri, baik jenjang bertingkatnya, kurikulum dan tolok ukurnya. Kiranya kurang tepat kebijakan Pimpinan ABRI yang mensyaratkan pendidikan keserjanaan yang diselenggarakan diluar Tentara dengan karier Perwira, dapat berakibat bias dalam pengabdian dan merit system. Berbagai negara mengatur dan memberi wewenang kepada Lembaga Pendidikan Militer untuk gelar keserjanaan, di mana pengetahuan militer sudah diakui sebagai ilmu. Di Indonesia masih menjadi ganjalan, bahwa ilmu militer belum diakui eksistensinya sebagai ilmu. Ilmu militer masih dianggap sebagai *art*, bagian dari ilmu sosial.

Peralatan Senjata. Tentara yang paling tahu peralatan dan senjata apa yang tepat bagi dirinya. Dengan kemajuan perkembangan ilmu dan teknologi, industri strategik pertahanan dapat dikerjakan diluar Tentara, tetapi requirement tetap oleh Tentara. Panglima ABRI yang menentukan postur kemampuan dan kekuatan, tetapi jenis dan kualitas

peralatan dan senjata ditentukan oleh Angkatan. Sebagai pengguna Panglima ABRI bisa menentukan kemampuan dan kekuatan yang dibutuhkan, akan tetapi penyiapan kemampuan dan kekuatan adalah wewenang Kepala Staf Angkatan. Panglima ABRI menentukan politik dan strategi penggunaan kemampuan, tetapi pembangunan kemampuan menjadi tanggungjawab Kepala Staf Angkatan.

Anggaran. Pemerintah bersama DPR menentukan APBN, termasuk anggaran belanja Tentara. Tetapi pelaksanaan anggaran beserta dananya diselenggarakan oleh Tentara sendiri. Tentara memiliki pejabat pemegang keuangan sebagaimana pejabat bendaharawan dari Departemen Keuangan. Dalam pengaturan gaji sebagai bagian dari perawatan militer, ada suatu hal yang secara prinsip harus diluruskan, yaitu bahwa status Prajurit ABRI disamakan dengan status PNS Pegawai Negeri Sipil. Mungkin hal tersebut dianggap kecil, tetapi kita tahu bahwa suatu penyimpangan biasa berawal dari hal-hal yang kecil.

Masalah di atas tentang empat elemen utama Tentara disampaikan secara lugas. Hal ini perlu karena pemahaman tentang ilmu militer semakin menurun, baik di dalam tubuh ABRI sendiri apalagi di luar ABRI.

Apakah ABRI mampu mereformasi dirinya sendiri? Ataukah memerlukan organ lain untuk

mereformasi ABRI? Mengulang apa yang telah disampaikan di atas, organisasi Tentara yang tetrahidron mengandung ciri *wholeness, self-regulation, dan self transformasion*, yaitu mampu dengan cepat menyesuaikan dan mengubah diri terhadap penyimpangan atau adanya embanan baru.

Namun demikian tidak berarti bahwa ABRI tidak memerlukan bantuan dari luar. Konsultan ahli dari luar dapat berguna, dan ABRI harus memanfaatkan perkembangan ilmu dan teknologi yang berkembang pesat di luar ABRI. ABRI harus dapat belajar dari pengalaman orang lain, bahkan belajar dari negara lain, agar mendapat bahan banding dan mengembangkan wawasan. Tetapi ABRI harus sadar bahwa ini skenario cerita tentang Tentara di Tanah Air, skenario cerita Tentara di Indonesia bukan skenario cerita Tentara di Amerika atau Eropa. ABRI harus menyadari akan jatidirinya, dengan latar belakang sosiohistorik perjalanan sejarah perjuangan bangsa Indonesia penghuni Nusantara ini.

Reformasi harus dilakukan dengan segera, krisis bangsa dan negara menuntut tanggungjawab dan pengabdian ABRI. Tetapi reformasi tidak boleh buru-buru, dalam arti memburu waktu tanpa kewaspadaan yang dapat menimbulkan kealpaan dan kekhilafan yang justru menjadi lebih buruk. Reformasi diselenggarakan dengan hati dingin, tanpa

